BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN BENCANA BANJIR DI LUBUK MINTURUN DAN BATU BUSUK KOTA PADANG TAHUN 2025

A. Gambaran Umum Kota Padang

Kota Padang merupakan salah satu kota tertua di pesisir barat Pulau Sumatera yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan pemerintahan, perdagangan, dan perekonomian di Provinsi Sumatera Barat. Pada mulanya, kawasan Padang merupakan sebuah perkampungan yang berada di bawah pengaruh Kerajaan Pagaruyung. Letaknya yang strategis di pesisir barat Pulau Sumatera menjadikan kawasan ini sebagai jalur perdagangan yang menghubungkan daerah pedalaman Minangkabau dengan para pedagang dari berbagai wilayah, baik dari Nusantara maupun mancanegara. Berbagai komoditas hasil bumi, seperti emas, lada, dan hasil pertanian lainnya diperdagangkan melalui kawasan Padang sehingga secara bertahap berkembang menjadi pusat aktivitas perdagangan di pantai barat Sumatera(Safwan et al., 1987).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Perkembangan Kota Padang semakin pesat sejak kedatangan bangsa Belanda melalui *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) pada abad ke-17. Pemerintah kolonial Belanda memanfaatkan letak strategis Kota Padang dengan membangun berbagai sarana perdagangan, pelabuhan, benteng pertahanan, serta infrastruktur pendukung lainnya. Salah satu pembangunan yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi Kota Padang adalah Pelabuhan Teluk Bayur yang pada masa kolonial dikenal dengan nama Emmahaven. Keberadaan pelabuhan tersebut menjadikan Kota Padang sebagai salah satu pusat perdagangan terpenting di pantai barat Pulau Sumatera karena menjadi jalur distribusi berbagai komoditas dari wilayah pedalaman Minangkabau menuju pasar nasional maupun internasional(Safwan et al., 1987).

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945, Kota Padang terus mengalami perkembangan yang signifikan dalam berbagai sektor pembangunan. Kota Padang kemudian ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat dan berfungsi sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain sebagai pusat pemerintahan, Kota Padang juga berkembang menjadi pusat pendidikan, perdagangan, jasa, kesehatan, dan berbagai aktivitas sosial ekonomi masyarakat(Hasibuan et al., 2023). Perkembangan tersebut didukung oleh pembangunan infrastruktur, sarana transportasi, fasilitas pendidikan, serta pelayanan publik yang semakin meningkat dari waktu ke waktu sehingga menjadikan Kota Padang sebagai kota terbesar di Provinsi Sumatera Barat.

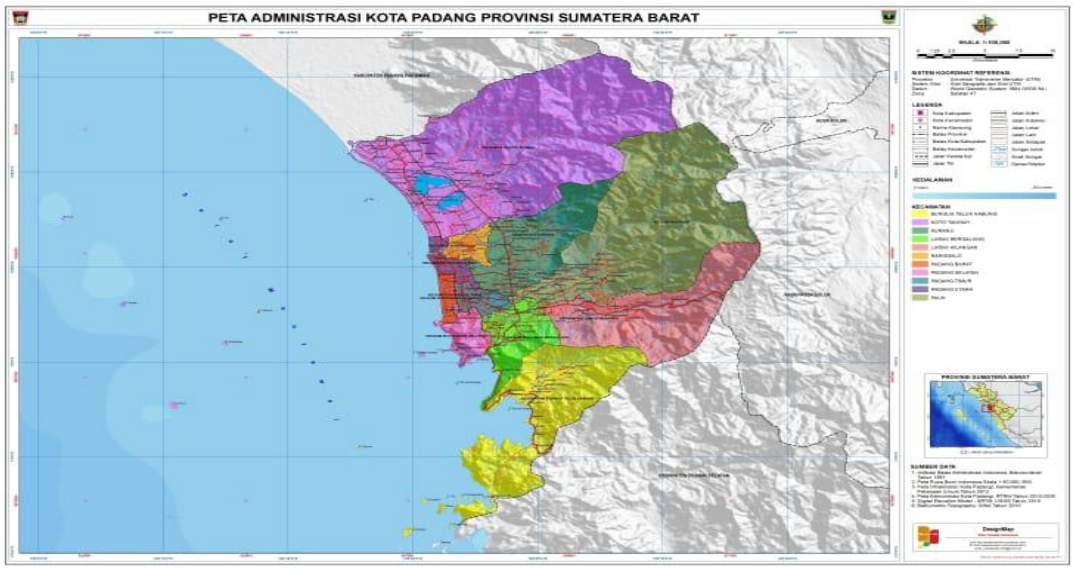
Seiring dengan perkembangan wilayahnya, Kota Padang memiliki kedudukan strategis sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat dan Pusat Kegiatan Nasional, dengan fungsi sebagai kota pelayanan (*service city*) yang didukung oleh keberadaan pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa, pusat pendidikan, serta pusat pelayanan dengan potensi wilayah yang menunjang kepariwisataan. Kedudukan tersebut menjadikan Kota Padang memiliki fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat serta dalam aktivitas sosial dan ekonomi di Sumatera Barat. Di sisi lain, perkembangan Kota Padang juga diikuti oleh pertumbuhan penduduk dan pembangunan, antara lain pembangunan perumahan dan kawasan perdagangan. Perkembangan tersebut dapat menimbulkan tekanan terhadap lingkungan, termasuk risiko perusakan dan pencemaran lingkungan hidup(Pendidikan & Kebudayaan, 2001, 9).

Secara geografis, Kota Padang terletak pada koordinat 0°44'–1°08' Lintang Selatan dan 100°05'–100°34' Bujur Timur. Kota ini memiliki luas wilayah sekitar 694,96 km^2 dengan karakteristik wilayah yang beragam, mulai dari kawasan pesisir, dataran rendah, perbukitan, hingga pegunungan yang merupakan bagian dari rangkaian Pegunungan Bukit Barisan. Kondisi

UIN IMAM BONJOL PADANG

geografis tersebut menyebabkan Kota Padang memiliki kekayaan sumber daya alam yang cukup besar, namun di sisi lain juga menjadikan wilayah ini rentan terhadap berbagai jenis bencana alam, seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, dan tsunami. Posisi Kota Padang yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia serta dilalui oleh sejumlah sungai besar turut memengaruhi tingkat kerawanan wilayah terhadap bencana hidrometeorologi, khususnya banjir pada musim penghujan(Pemerintah Kota Padang, 2026).

Gambar 3.1 Peta Administrasi Kota Padang



Sumber: Bappeda Kota Padang/BPS Kota Padang.

Berdasarkan Gambar 3.1, dapat diketahui bahwa Kota Padang memiliki wilayah administrasi yang cukup luas dengan karakteristik geografis yang beragam, meliputi kawasan daratan, pesisir, dan kepulauan. Kondisi geografis tersebut memengaruhi pola pemanfaatan ruang, persebaran penduduk, serta karakteristik kerawanan bencana di berbagai kawasan Kota Padang. Secara administratif, Kota Padang berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman di sebelah utara, Kabupaten Solok di sebelah timur, Kabupaten Pesisir Selatan di sebelah selatan, dan Samudera Hindia di

sebelah barat. Selain wilayah daratan, Kota Padang juga memiliki wilayah perairan yang mencakup 19 pulau kecil yang tersebar di beberapa kecamatan. Keberadaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut menjadi salah satu potensi pengembangan sumber daya kelautan, perikanan, dan pariwisata bahari di Kota Padang(Evelina & Barus, 2023).

Badan Pusat Statistik Kota Padang dalam *Kota Padang Dalam Angka 2026*, jumlah penduduk Kota Padang pada tahun 2025 mencapai sekitar 950.512 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sekitar 1.366 jiwa/km^2. Jumlah tersebut menjadikan Kota Padang sebagai daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Sumatera Barat. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan lahan permukiman, sarana dan prasarana umum, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta berbagai pelayanan publik lainnya. Di sisi lain, peningkatan jumlah penduduk juga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengendalikan pemanfaatan ruang agar tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana(Badan Pusat Statistik Kota Padang, 2026).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Secara administratif, Kota Padang terbagi ke dalam 11 kecamatan, yaitu Bungus Teluk Kabung, Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung, Padang Selatan, Padang Timur, Padang Barat, Padang Utara, Nanggalo, Kuranji, Pauh, dan Koto Tangah. Setiap kecamatan memiliki karakteristik geografis, kondisi sosial, potensi ekonomi, serta tingkat kerawanan bencana yang berbeda-beda(Badan Pusat Statistik Kota Padang, 2026). Dalam penelitian ini, lokasi penelitian difokuskan pada Kelurahan Lubuk Minturun Sungai Lareh di Kecamatan Koto Tangah dan Kelurahan Batu Busuk di Kecamatan Pauh. Kedua wilayah tersebut dipilih karena merupakan kawasan yang dalam beberapa tahun terakhir sering mengalami bencana banjir dan banjir bandang dengan dampak yang cukup besar terhadap masyarakat, seperti kerusakan permukiman, infrastruktur, serta terganggunya aktivitas sosial

dan ekonomi. Selain itu, kedua wilayah tersebut menjadi lokasi pelaksanaan berbagai kebijakan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Kota Padang. Oleh karena itu, kedua kelurahan tersebut dinilai relevan sebagai lokasi penelitian untuk menganalisis kebijakan Pemerintah Daerah Kota Padang dalam penanganan bencana banjir ditinjau dari perspektif *Siyāsah Syar'iyyah*.

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kelurahan Lubuk Minturun

a. Sejarah

Kelurahan Lubuk Minturun Sungai Lareh merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Sebelum menjadi bagian dari wilayah administrasi Kota Padang, kawasan Lubuk Minturun merupakan bagian dari Kabupaten Padang Pariaman. Berdasarkan kebijakan perluasan wilayah administratif Kota Padang pada tahun 1980, wilayah Lubuk Minturun resmi menjadi bagian dari Kota Padang. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kelurahan, Kelurahan Lubuk Minturun dan Kelurahan Sungai Lareh digabungkan menjadi Kelurahan Lubuk Minturun Sungai Lareh yang berada di bawah administrasi Kecamatan Koto Tangah. Penggabungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penataan wilayah pemerintahan guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan di tingkat kelurahan.

Seiring dengan perkembangan wilayah Kota Padang, Kelurahan Lubuk Minturun Sungai Lareh berkembang sebagai salah satu kawasan yang memiliki potensi pertanian dan agrowisata. Kawasan Agrowisata Lubuk Minturun berada di Kecamatan Koto Tangah dan mencakup Kelurahan Lubuk Minturun Sungai Lareh serta Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto. Kawasan

UIN IMAM BONJOL PADANG

tersebut memiliki potensi sumber daya lokal berupa lahan pertanian, perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, perikanan, dan peternakan yang dapat mendukung pengembangan agrowisata(Faiza, Miftahul,Idajati, 2023). Selain itu, Lubuk Minturun Sungai Lareh dikenal sebagai salah satu sentra usaha tanaman hias di Kota Padang yang turut menjadi sumber kegiatan ekonomi masyarakat.

Secara geografis, Kelurahan Lubuk Minturun Sungai Lareh memiliki luas wilayah sekitar 23,29 km^2 dan memiliki karakteristik wilayah berupa lahan pertanian serta kawasan perbukitan.[3] Kondisi tersebut mendukung perkembangan kegiatan pertanian dan agrowisata di kawasan Lubuk Minturun. Namun, karakteristik wilayah dan kondisi hidrologis kawasan juga berkaitan dengan kerawanan terhadap bencana hidrometeorologi. Penelitian mengenai Perumahan Safa dan Marwa di Lubuk Minturun menunjukkan bahwa kawasan tersebut mengalami banjir ketika terjadi hujan dengan intensitas dan durasi tertentu. Selain itu, DAS Air Dingin yang berkaitan dengan kawasan Lubuk Minturun juga memiliki potensi kejadian banjir yang dipengaruhi oleh kondisi topografi, sedimentasi, dan perubahan penggunaan lahan(MERA dkk, 2021).

UIN IMAM BONJOL
PADANG



Gambar 3.2 Peta Kelurahan Lubuk Minturun

Sumber: Profil Kelurahan Lubuk Minturun Sungai Lareh

Berdasarkan peta tersebut, Kelurahan Lubuk Minturun Sungai Lareh berada di wilayah timur Kecamatan Koto Tangah dan memiliki kondisi geografis yang didominasi oleh kawasan perbukitan serta dialiri beberapa sungai yang berhulu di kawasan Bukit Barisan. Keberadaan sungai-sungai tersebut memiliki peran penting sebagai sumber daya air bagi masyarakat, tetapi pada musim hujan sering mengalami peningkatan debit air yang berpotensi menimbulkan banjir dan banjir bandang. Selain dipengaruhi oleh faktor alam, perubahan penggunaan lahan, perkembangan kawasan permukiman, serta berkurangnya daerah resapan air turut meningkatkan risiko terjadinya banjir di beberapa wilayah kelurahan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Tabel 3.2 Batas Wilayah Kel Lubuk Minturun

Arah	Batas Wilayah
Utara	Kabupaten Padang Pariaman
Selatan	Kelurahan Balai Gadang dan Kelurahan Koto Panjang
Barat	Kelurahan Lubuk Buaya dan Kelurahan Pasie Nan Tigo
Timur	Kecamatan Kuranji dan kawasan perbukitan

Sumber: Profil Kelurahan Lubuk Minturun Sungai Lareh Tahun 2026/Pemerintah Kota Padang.

Berdasarkan Tabel 3.2, Kelurahan Lubuk Minturun Sungai Lareh memiliki letak yang strategis karena berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Padang Pariaman di sebelah utara, Kelurahan Balai Gadang dan Kelurahan Koto Panjang di sebelah selatan, Kelurahan Lubuk Buaya dan Kelurahan Pasie Nan Tigo di sebelah barat, serta Kecamatan Kuranji dan kawasan perbukitan di sebelah timur. Oleh karena itu, wilayah ini memiliki potensi yang cukup tinggi terhadap terjadinya banjir, terutama pada saat intensitas curah hujan meningkat.

UIN IMAM BONJOL PADANG

b. Jumlah Penduduk

Berdasarkan Profil Kelurahan Lubuk Minturun Sungai Lareh Tahun 2026, jumlah penduduk di kelurahan ini mencapai 10.040 jiwa dengan 3.002 Kepala Keluarga (KK). Dalam penyelenggaraan pemerintahan, wilayah kelurahan terbagi ke dalam 10 Rukun Warga (RW) dan 34 Rukun Tetangga (RT).

Tabel 3.1 Kondisi Umum Kelurahan Lubuk Minturun Sungai Lareh

NO	Uraian	Keterangan
1.	Luas Wilayah	23,29 km^2
2.	Jumlah Penduduk	10.040 jiwa
3.	Jumlah Kartu Keluarga(kk)	3.002 KK
4.	Jumlah Rukun Warga(RW)	10 RW
5.	Jumlah Rukun Tetangga(RT)	34 RT

Sumber: Profil Kelurahan Lubuk Minturun Sungai Lareh Tahun 2026.

c. Peristiwa Banjir di Kelurahan Lubuk Minturun Tahun 2025

Kelurahan Lubuk Minturun Sungai Lareh merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Koto Tangah yang terdampak bencana banjir pada tahun 2025. Banjir terjadi akibat tingginya intensitas curah hujan yang menyebabkan peningkatan debit air sungai dan limpasan air dari kawasan hulu. Kondisi geografis Lubuk Minturun yang memiliki kawasan perbukitan dan dialiri aliran sungai menyebabkan wilayah ini memiliki kerawanan terhadap banjir, terutama ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu yang cukup lama.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Banjir yang terjadi pada tahun 2025 menimbulkan dampak terhadap masyarakat, permukiman, dan lingkungan. Berdasarkan data penanganan bencana, sebanyak 5 orang meninggal dunia akibat bencana tersebut. Selain korban jiwa, sebagian masyarakat juga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Salah satu lokasi pengungsian berada di SD 41 Lori, RT 03/RW 03, Kelurahan Lubuk Minturun, dengan jumlah 35 orang pengungsi, yang terdiri dari 17 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Berdasarkan kelompok usia, pengungsi tersebut terdiri dari 1 bayi, 12 anak-anak, dan 2 orang lanjut usia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bencana juga

berdampak terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus dalam proses evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar.

d. Kerusakan Rumah dan lahan pertanian

Dampak banjir juga terlihat dari kerusakan rumah masyarakat. Berdasarkan data kerusakan akibat bencana, terdapat 12 unit rumah mengalami rusak berat atau hanyut, 86 unit rumah mengalami rusak sedang, dan 90 unit rumah mengalami rusak ringan. Dengan demikian, jumlah rumah yang tercatat mengalami kerusakan mencapai 188 unit rumah. Kerusakan tersebut menyebabkan sebagian masyarakat kehilangan tempat tinggal atau tidak dapat menggunakan rumahnya secara normal sehingga membutuhkan bantuan dan penanganan dari pemerintah.

Tabel 3.2 Kerusakan Rumah Akibat Banjir di Kelurahan Lubuk Minturun Tahun 2025

No	Tingkat Kerusakan	Jumlah
1.	Rusak berat/hanyut	12 unit
2.	Rusak sedang	86 unit
3.	Rusak sedang	90 unit
	jumlah	188 unit

Sumber: Data penanganan bencana Kelurahan Lubuk Minturun/BPBD Kota Padang Tahun 2025.

Selain kerusakan rumah, banjir juga berdampak terhadap lahan dan tanaman pertanian yang menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat Lubuk Minturun. Berdasarkan data kerusakan lahan dan tanaman pertanian, beberapa kelompok tani mengalami kerugian akibat lahan pertanian yang terendam banjir. Kerusakan tersebut terjadi baik pada

UIN IMAM BONJOL PADANG

tanaman yang masih dalam tahap pertumbuhan maupun tanaman yang telah mendekati masa panen.

Tabel 3.2 Kerusakan Lahan dan Tanaman Pertanian Akibat Banjir di Kelurahan Lubuk Minturun Tahun 2025

No	Nama	Luas Terdampak	Kondisi Tanah	Taksiran Kerugian
1.	Poktan Fitrah LubukMinturun	1 ha	Umur tanaman ±10 HST dan terendam banjir selama ±1 minggu	Rp575.000
2.	Poktan Lubuk Ramang	2 ha	Tanaman akan panen dan terendam banjir	Rp5.650.000
3.	Poktan Budi Sepakat	0,5 ha	Tanaman akan panen dan terendam banjir	Rp5.162.500
4.	Poktan Air Sarasah	5 ha	Tanaman akan panen	Rp6.625.000

UIN IMAM BONJOL PADANG

Sumber: Data penanganan bencana Kelurahan Lubuk Minturun/BPBD Kota Padang Tahun 2025.

Berdasarkan tabel tersebut, lahan pertanian yang tercatat terdampak mencapai 8,5 hektare, dengan total taksiran kerugian sebesar Rp18.012.500. Dampak tersebut menunjukkan bahwa banjir tidak hanya menyebabkan kerusakan pada tempat tinggal masyarakat, tetapi juga memengaruhi sektor pertanian dan sumber penghidupan masyarakat. Dalam penanganan saat bencana, Pemerintah Kota Padang melalui BPBD bersama pemerintah kelurahan dan unsur terkait melakukan evakuasi masyarakat, pendataan korban dan kerusakan, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat

terdampak. Masyarakat yang harus mengungsi ditempatkan pada lokasi yang telah ditentukan, sementara kebutuhan pangan dan logistik diberikan sesuai kondisi dan kebutuhan di lapangan.

e. Masa pemulihan banjir

Setelah masa tanggap darurat, pemerintah melanjutkan penanganan pada tahap pemulihan. Masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan mendapatkan bantuan sesuai dengan tingkat kerusakan. Berdasarkan data BPBD Kota Padang, bantuan stimulan rumah rusak ringan dan sedang telah disalurkan kepada 55 KK pada tahap I, sedangkan 6 KK pada tahap II masih dalam proses pengusulan kepada BNPB. Besaran bantuan stimulan yaitu Rp15.000.000 untuk rumah rusak ringan dan Rp30.000.000 untuk rumah rusak sedang. Selain bantuan stimulan, pemerintah juga memberikan jaminan hidup dan santunan bagi keluarga korban meninggal dunia, menyediakan hunian sementara bagi masyarakat yang rumahnya tidak dapat ditempati, serta melanjutkan pembangunan hunian tetap sebagai bagian dari pemulihan jangka panjang.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Sampai tahun 2026, penanganan pascabencana di Lubuk Minturun masih berlanjut, khususnya dalam pembangunan hunian tetap. Berdasarkan data perkembangan terakhir, pembangunan Huntap Terpadu di kawasan Balai Gadang masih berjalan. Sebanyak 85 unit telah dikerjakan, dengan rincian 39 unit telah teratap, 12 unit belum teratap, dan 34 unit masih dalam pekerjaan struktur bawah. Selain itu, terdapat rencana pembangunan 340 unit oleh Yayasan Buddha Tzu Chi, sehingga keseluruhan rencana pembangunan hunian tetap di lokasi tersebut mencapai 523 unit. Penanganan bencana di Lubuk Minturun juga diarahkan pada peningkatan kesiapsiagaan masyarakat agar risiko bencana pada masa mendatang dapat dikurangi. Pemerintah melalui BPBD memberikan informasi mengenai potensi banjir, meningkatkan kewaspadaan masyarakat, serta melakukan

koordinasi dengan pemerintah kelurahan, RT/RW, dan masyarakat di wilayah rawan bencana.

Dengan demikian, bencana banjir tahun 2025 di Kelurahan Lubuk Minturun memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat. Dampak tersebut terlihat dari adanya 5 korban meninggal dunia, 35 orang yang tercatat mengungsi di SD 41 Lori, 188 unit rumah yang mengalami kerusakan, serta 8,5 hektare lahan pertanian yang terdampak dengan taksiran kerugian Rp18.012.500. Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar bagi Pemerintah Kota Padang untuk melaksanakan berbagai kebijakan penanggulangan bencana, mulai dari tanggap darurat, pemberian bantuan, pemulihan rumah dan mata pencaharian, penyediaan hunian sementara, hingga pembangunan hunian tetap.

2. Kelurahan Lambung Bukik (Kawasan Batu Busuk)

a. Sejarah

Kelurahan Lambung Bukik merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perluasan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, wilayah Kecamatan Pauh, termasuk Kelurahan Lambung Bukik, resmi menjadi bagian dari wilayah administrasi Kota Padang. Sebelum adanya perluasan wilayah tersebut, kawasan Lambung Bukik merupakan bagian dari Kabupaten Padang Pariaman. Sejak bergabung ke dalam wilayah administrasi Kota Padang, pembangunan di Kelurahan Lambung Bukik terus mengalami perkembangan, baik pada bidang pemerintahan, pendidikan, infrastruktur, maupun pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu kawasan yang berada dalam wilayah administratif Kelurahan Lambung Bukik adalah Kampung Batu Busuk, yang sekaligus menjadi lokasi

UIN IMAM BONJOL PADANG

penelitian dalam skripsi ini. Batu Busuk merupakan kawasan yang berada di bagian hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Kuranji dan berbatasan langsung dengan kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Dr. Mohammad Hatta serta rangkaian Pegunungan Bukit Barisan. Berdasarkan cerita yang berkembang di tengah masyarakat, nama Batu Busuk berasal dari sebuah batu besar yang berada di tepi sungai dan selalu dikerumuni lalat hijau meskipun tidak mengeluarkan bau busuk. Cerita tersebut kemudian menjadi asal-usul penamaan kawasan Batu Busuk yang masih dikenal hingga saat ini. Berbeda dengan kawasan perkotaan lainnya di Kota Padang, Batu Busuk masih mempertahankan karakter wilayah yang didominasi oleh kawasan hutan, perbukitan, daerah aliran sungai, serta lahan pertanian. Sebagian besar masyarakat menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan usaha berbasis hasil pertanian. Selain itu, kawasan Batu Busuk juga dikenal sebagai salah satu sentra produksi durian di Kota Padang serta memiliki potensi wisata alam yang cukup besar karena memiliki panorama perbukitan, sungai, dan kawasan hutan yang masih alami.

Secara geografis, Kelurahan Lambung Bukik memiliki luas wilayah sekitar 38,80 km^2 dan merupakan salah satu kelurahan dengan wilayah terluas di Kecamatan Pauh. Kawasan Batu Busuk terletak di bagian timur Kota Padang dan berada di kawasan hulu Sungai Batang Kuranji. Kondisi wilayah didominasi oleh perbukitan dengan kemiringan lereng yang cukup curam serta dialiri beberapa anak sungai yang bermuara ke Sungai Batang Kuranji. Karakteristik tersebut menjadikan wilayah ini memiliki fungsi penting sebagai kawasan resapan air, daerah konservasi, sekaligus penyangga keseimbangan ekosistem Kota Padang.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Gambar 3.3 Peta Kelurahan Lambung Bukik



Sumber: Profil Kelurahan Lambung Bukik Tahun 2026.

Berdasarkan peta tersebut, Kelurahan Lambung Bukik memiliki posisi geografis yang berada di bagian timur Kota Padang. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Solok, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Limau Manis Selatan, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Cupak Tangah, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Dr. Mohammad Hatta. Letak geografis tersebut menyebabkan wilayah Lambung Bukik memiliki fungsi sebagai kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Kuranji sekaligus daerah resapan air yang sangat penting bagi Kota Padang.

Ditinjau dari kondisi topografinya, Kelurahan Lambung Bukik didominasi oleh bentang alam berupa perbukitan, lereng, lembah, dan daerah aliran sungai. Sebagian wilayah dimanfaatkan sebagai kawasan permukiman, sedangkan sebagian lainnya masih berupa kawasan hutan, lahan pertanian, perkebunan, dan ruang terbuka hijau. Kondisi topografi tersebut menyebabkan aliran air hujan dari kawasan hulu mengalir menuju Sungai

Batang Kuranji. Pada musim penghujan, tingginya curah hujan sering menyebabkan peningkatan debit sungai yang berpotensi menimbulkan banjir bandang dan tanah longsor, terutama pada kawasan permukiman yang berada di sepanjang aliran sungai.

b. Jumlah penduduk

Berdasarkan Profil Kelurahan Lambung Bukik Tahun 2026, jumlah penduduk di kelurahan ini mencapai sekitar 4.000 jiwa yang tersebar dalam 4 Rukun Warga (RW) dan 13 Rukun Tetangga (RT). Jumlah penduduk tersebut menunjukkan bahwa kepadatan penduduk di Kelurahan Lambung Bukik relatif lebih rendah dibandingkan wilayah perkotaan lainnya karena sebagian besar wilayahnya masih berupa kawasan hutan dan lahan pertanian.

Tabel 3.4 Kondisi Umum Kelurahan Lambung Bukik

NO	Uraian	Keterangan
1.	Luas Wilayah	38,80 km^2
2.	Jumlah Penduduk	4.000jiwa
3.	Jumlah Kartu Keluarga(kk)	300 KK
4.	Jumlah Rukun Warga(RW)	4 RW
5.	Jumlah Rukun Tetangga(RT)	13 RT

Sumber: Profil Kelurahan Lambung Bukik Tahun 2026.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Lambung Bukik masih didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, serta usaha mikro berbasis hasil pertanian. Durian menjadi salah satu komoditas unggulan yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat, terutama pada musim panen. Selain itu, sebagian masyarakat bekerja sebagai aparatur sipil negara, tenaga pendidik, karyawan swasta,

UIN IMAM BONJOL PADANG

pedagang, dan pelaku usaha lainnya. Keberadaan fasilitas pendidikan, tempat ibadah, sarana kesehatan, serta akses jalan turut mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

c. Peristiwa Banjir Bandang di Kawasan Batu Busuk Tahun 2025

Kawasan Batu Busuk yang berada di Kelurahan Lambung Bukik, Kecamatan Pauh, merupakan salah satu wilayah yang terdampak cukup parah akibat bencana banjir bandang atau galodo pada akhir tahun 2025. Kondisi geografis Batu Busuk yang berada di kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Kuranji dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan menyebabkan wilayah ini memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap banjir bandang. Ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi, debit air sungai meningkat secara cepat dan membawa material berupa batu, kayu, lumpur, serta material lainnya yang kemudian menghantam kawasan permukiman masyarakat.

d. Kerusakan rumah

Kerusakan paling parah terjadi pada permukiman yang berada tepat di sepanjang bantaran DAS Kuranji, khususnya kawasan Batu Busuk dan beberapa bagian Kelurahan Lambung Bukik. Berdasarkan data kerusakan yang diperoleh dalam penelitian, tidak terdapat korban jiwa pada kejadian banjir bandang tersebut. Meskipun demikian, bencana menyebabkan kerusakan yang cukup besar terhadap rumah masyarakat dan fasilitas umum. Tercatat sebanyak 11 unit rumah hanyut, 258 unit rumah mengalami rusak berat, 16 unit rumah mengalami rusak sedang, dan 33 unit rumah mengalami rusak ringan.Kerusakan paling parah terjadi di RT 01/RW 03 Batu Busuk, yang merupakan salah satu titik permukiman paling dekat dengan aliran sungai dan kelokan sungai. Pada lokasi tersebut terdapat rumah masyarakat yang hanyut akibat derasnya aliran air dan material yang terbawa banjir bandang. Selain rumah yang hanyut, rumah-rumah lainnya

UIN IMAM BONJOL PADANG

mengalami kerusakan berat akibat hantaman material berupa kayu berukuran besar, batu, dan timbunan lumpur.Kerusakan juga terjadi di RT 03/RW 04 Lambung Bukit, yaitu kawasan permukiman yang berada di sekitar aliran hulu sungai. Luapan air yang datang secara tiba-tiba menyebabkan rumah masyarakat terdampak dan mengalami kerusakan pada bagian struktur bangunan. Selain itu, kerusakan terjadi pada jalur penghubung Kelurahan Kapalo Koto–Kelurahan Lambung Bukik, terutama pada badan jalan dan jembatan penghubung antarwilayah. Badan jalan mengalami kerusakan akibat tergerus aliran air. Kondisi tersebut juga berdampak terhadap fasilitas umum, termasuk tempat ibadah dan rumah masyarakat yang berada di sekitar jalan(BPBD Kota padang, 2025).

e. Lokasi pengungsian Dampak

bencana juga dirasakan oleh masyarakat melalui terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi. Kerusakan rumah menyebabkan sebagian masyarakat harus meninggalkan tempat tinggalnya dan mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Berdasarkan data pengungsian di Kecamatan Pauh, terdapat sekitar 1.526 jiwa masyarakat yang mengungsi. Pengungsian tersebut tersebar pada beberapa lokasi, yaitu SDN 02 sebanyak 312 jiwa, Masjid Raya Pasar Baru sebanyak 270 jiwa, Masjid Al-Ihsan sebanyak 250 jiwa, kawasan Rimbo Panjang dan PLTA (Dapur SMP 44) sebanyak 213 jiwa, Masjid Taqwa sebanyak 209 jiwa, serta Masjid Tajul Arifin sebanyak 330 jiwa. Masyarakat yang mengungsi terdiri atas laki-laki, perempuan, bayi, anak-anak, lansia, serta kelompok rentan lainnya(BPBD, 2025).

f. Kerusakan Infrastuktur

Selain permukiman, bencana banjir bandang juga menyebabkan kerusakan fasilitas umum. Salah satu fasilitas yang terdampak adalah Mushalla Jamiatulrahmah Kelurahan Lambung Bukik yang mengalami kerusakan berat hingga bangunan hanyut. Sementara itu, Masjid Ikhlas

UIN IMAM BONJOL PADANG

Lambung Bukik mengalami kerusakan pada bagian dinding bangunan. Kerusakan tersebut menyebabkan sebagian fasilitas ibadah tidak dapat digunakan secara normal setelah terjadinya bencana.

g. Kerusakan lahan pertanian

Bencana juga memberikan dampak terhadap sektor pertanian masyarakat. Berdasarkan data kerusakan lahan dan tanaman pertanian, Daerah Irigasi (DI) Dunung Nago Kanan dan DI Sungkai Lambung Bukik memiliki luas lahan terdampak sebesar 46,87 hektare. Lahan pertanian tersebut terdampak akibat genangan, aliran air, lumpur, dan material yang terbawa banjir. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas pertanian masyarakat terganggu dan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi petani. Nilai kerugian material akibat kerusakan rumah, fasilitas umum, infrastruktur, dan lahan pertanian selanjutnya dihitung berdasarkan hasil pendataan dan penilaian kerusakan oleh pemerintah dan instansi terkait(BPBD, 2025).

h. Penanganan dan Bantuan terhadap Masyarakat Terdampak

UIN IMAM BONJOL PADANG

Pada saat bencana terjadi, Pemerintah Kota Padang melalui BPBD bersama pemerintah kecamatan, kelurahan, TNI, relawan, dan masyarakat melakukan evakuasi terhadap warga yang terdampak. Masyarakat yang berada di lokasi berisiko dipindahkan ke tempat pengungsian yang telah disiapkan. Pemerintah juga melakukan pendataan terhadap jumlah masyarakat terdampak, kondisi rumah, fasilitas umum, serta kebutuhan masyarakat selama berada di lokasi pengungsian. Pada masa tanggap darurat, bantuan diberikan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Bantuan tersebut meliputi makanan dan logistik, perlengkapan kebersihan, perlengkapan tidur, serta kebutuhan lainnya bagi masyarakat yang berada di tempat pengungsian. Penanganan juga dilakukan dengan

menyediakan tempat pengungsian pada sejumlah fasilitas umum yang dianggap aman dari ancaman banjir.

Setelah masa tanggap darurat berakhir, penanganan dilanjutkan melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah melakukan pendataan dan penilaian terhadap rumah masyarakat yang hanyut maupun rusak untuk menentukan bentuk bantuan dan penanganan yang diperlukan. Selain itu, perbaikan terhadap jalan, jembatan, fasilitas umum, serta sarana pendukung masyarakat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemerintah. Salah satu bentuk penanganan pascabencana adalah penyediaan hunian bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan berat atau hanyut. Pemerintah Kota Padang melalui instansi terkait melaksanakan pembangunan dan penyediaan hunian tetap bagi masyarakat terdampak. Di kawasan Batu Busuk terdapat pembangunan hunian yang dilaksanakan melalui beberapa pihak dan skema, termasuk pembangunan 18 unit hunian yang terdiri dari 15 unit di Rimbo Panjang dan 3 unit di Gerbang Langit, serta 10 unit Huntap Mandiri yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Padang bersama KADIN dan didukung BNPB.

UIN IMAM BONJOL PADANG

i. Kebijakan Pemerintah terhadap Permukiman di Bantaran Sungai dan Perlindungan Hutan

Berdasarkan wawancara dengan BPBD Kota Padang Bapak Robert Eka Putra beliau menjelaskan, kondisi bencana di Batu Busuk menunjukkan bahwa permukiman yang berada di sekitar bantaran sungai memiliki risiko tinggi terhadap banjir bandang. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Padang melalui BPBD melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai potensi bencana, peringatan dini, jalur evakuasi, serta langkah yang harus dilakukan saat terjadi keadaan darurat. Bagi masyarakat yang tinggal di kawasan berisiko tinggi dan rumahnya mengalami kerusakan berat

atau hanyut, pemerintah menyediakan hunian di lokasi yang lebih aman sebagai bagian dari penanganan pascabencana.

Selain penataan permukiman, pemerintah juga memperhatikan perlindungan kawasan hutan di sekitar hulu DAS Batang Kuranji. Kawasan hutan dan perbukitan berfungsi sebagai daerah resapan dan tangkapan air sehingga perlu dijaga dari kerusakan dan perubahan fungsi lahan. Dengan demikian, penanganan banjir di Batu Busuk dilakukan melalui evakuasi dan bantuan saat bencana, pendataan kerusakan, perbaikan infrastruktur, penyediaan hunian, serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan perlindungan lingkungan.

C. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Padang. Keberadaan BPBD dibentuk sebagai implementasi dari kebijakan nasional di bidang penanggulangan bencana yang mengamanatkan agar setiap pemerintah daerah memiliki lembaga khusus yang bertanggung jawab dalam melaksanakan penanggulangan bencana secara terpadu, terencana, terkoordinasi, dan menyeluruh. Pembentukan lembaga ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman berbagai jenis bencana, baik bencana alam, bencana nonalam, maupun bencana sosial. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Padang. Keberadaan BPBD dibentuk sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mengamanatkan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota(UU NO 24 TAHUN, 2007).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Lahirnya BPBD tidak dapat dipisahkan dari terjadinya berbagai bencana besar di Indonesia, khususnya bencana gempa bumi dan tsunami Aceh pada tahun 2004 yang menyebabkan perubahan paradigma penanggulangan bencana di Indonesia. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penanganan bencana masih bersifat sektoral dan lebih berorientasi pada tindakan tanggap darurat setelah terjadinya bencana (*emergency response*). Kondisi tersebut dinilai belum mampu memberikan perlindungan yang optimal kepada masyarakat karena aspek pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi belum menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana. Selain itu, diterbitkan pula Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam membentuk BPBD.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Kota Padang membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Wali Kota Padang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana. Keberadaan BPBD Kota Padang kemudian disesuaikan dengan perkembangan regulasi pemerintahan daerah, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,

yang mengatur kembali kedudukan organisasi perangkat daerah agar lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja BPBD Kota Padang diatur melalui Peraturan Wali Kota Padang Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang.

Pembentukan BPBD Kota Padang dilatarbelakangi oleh kondisi geografis Kota Padang yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang sangat tinggi. Kota Padang berada di pesisir barat Pulau Sumatera yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia serta berada pada zona subduksi pertemuan Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Eurasia. Kondisi tersebut menyebabkan Kota Padang berpotensi mengalami gempa bumi tektonik dan tsunami. Selain itu, topografi Kota Padang yang terdiri atas kawasan pesisir, dataran rendah, perbukitan, serta daerah aliran sungai menyebabkan wilayah ini juga rentan terhadap banjir, banjir bandang, tanah longsor, abrasi pantai, angin puting beliung, dan cuaca ekstrem. Oleh karena itu, keberadaan BPBD menjadi sangat penting dalam mengoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara menyeluruh.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Dalam perkembangannya, BPBD Kota Padang terus melakukan penguatan kapasitas kelembagaan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana kebencanaan, pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC), pembinaan Kelompok Siaga Bencana (KSB), penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB), penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), penyusunan dokumen rencana kontinjensi, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kebencanaan, simulasi evakuasi bencana, serta penguatan koordinasi dengan berbagai instansi terkait, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Basarnas, BMKG, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan relawan

kebencanaan. Saat ini BPBD Kota Padang dipimpin oleh Hendri Zulviton, S.T., M.T. selaku Kepala Pelaksana. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Pelaksana dibantu oleh sekretariat dan bidang-bidang teknis, yaitu Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik yang dipimpin oleh Ricki Januar Alexander, S.STP., M.PA., serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dipimpin oleh Basril, S.T., M.M. Melalui struktur organisasi tersebut, BPBD Kota Padang melaksanakan fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari prabencana, saat tanggap darurat, hingga pascabencana(BPBD Kota padang, 2026).

Dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD Kota Padang berpedoman pada visi pembangunan Pemerintah Kota Padang serta Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kota Padang yang menitikberatkan pada terwujudnya masyarakat yang tangguh terhadap bencana melalui penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, cepat, tepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Visi tersebut diwujudkan melalui berbagai program mitigasi, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, penguatan sistem peringatan dini, peningkatan kapasitas aparatur, serta rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana. Dengan demikian, BPBD Kota Padang tidak hanya berperan sebagai lembaga yang menangani keadaan darurat, tetapi juga menjadi institusi yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana secara berkelanjutan. Sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta Peraturan Wali Kota Padang mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja BPBD Kota Padang. Keberadaan BPBD

UIN IMAM BONJOL PADANG

bertujuan agar penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan secara terpadu melalui koordinasi seluruh perangkat daerah, instansi vertikal, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat sehingga tercipta sistem penanggulangan bencana yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Tugas, fungsi, dan wewenang BPBD Kota Padang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, serta Peraturan Wali Kota Padang Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja BPBD Kota Padang.

A. Tugas BPBD Kota Padang

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, BPBD mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Pelaksanaan tugas tersebut mencakup seluruh tahapan penanggulangan bencana, yaitu prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPBD Kota Padang bertanggung jawab untuk:

1. merumuskan kebijakan teknis penanggulangan bencana di Kota Padang;
2. mengoordinasikan seluruh perangkat daerah dan instansi terkait dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
3. melaksanakan kegiatan pencegahan dan mitigasi bencana;
4. meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan kebencanaan;
5. melaksanakan penanganan darurat ketika terjadi bencana;
6. mengoordinasikan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana; dan

7. menyampaikan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Wali Kota Padang dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Dengan demikian, BPBD tidak hanya bertugas ketika bencana telah terjadi, tetapi juga bertanggung jawab melakukan berbagai upaya pengurangan risiko bencana sebelum bencana terjadi.

B. Fungsi BPBD Kota Padang

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPBD Kota Padang memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

1. penyusunan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana;
2. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
3. pelaksanaan komando pada saat keadaan darurat bencana;
4. pelaksanaan fungsi operasional penanggulangan bencana;
5. pelaksanaan pengendalian penggunaan bantuan logistik dan peralatan kebencanaan;
6. penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), dan Rencana Kontinjensi;
7. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, simulasi, dan sosialisasi kebencanaan; serta
8. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
9. Fungsi tersebut menunjukkan bahwa BPBD berperan sebagai koordinator utama seluruh kegiatan penanggulangan bencana di Kota Padang.

UIN IMAM BONJOL PADANG

C. Wewenang BPBD Kota Padang

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Kewenangan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, BPBD mempunyai fungsi perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif, dan efisien serta pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, BPBD mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
2. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
6. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
7. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

UIN IMAM BONJOL PADANG

8. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
9. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. Struktur Organisasi BPBD

Struktur organisasi BPBD Kota Padang disusun berdasarkan ketentuan organisasi perangkat daerah dan terdiri atas unsur pengarah serta unsur pelaksana. Unsur pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Sesuai struktur organisasi BPBD Kota Padang, jabatan pimpinan saat ini meliputi:

1. Kepala Pelaksana: Hendri Zulviton, S.T., M.T.
2. Sekretaris :Robert Candra Eka Putra,S.Sos.,M.Si.
3. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik : Ricki Januar Alexander, S.STP., M.PA.
4. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi: Basril, S.T., M.M.
5. Kepala Bidang Pencegahan & kesiapsiagaan :Deni Harzandy ,S.Sos
6. Kepala Sub Bagian Umum :Nuresi, S .Sos.
7. Kepala Sub Bagian Keuangan : Rismadona, S.E.
8. Perencana Ahli Muda : Vike Oktavia Kapoyos ,S.H.,M.H.
9. Analis Kebencanaan Ahli Muda : Djiliusrin,SH
10. Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda : Dedy Efrizal,S.E.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Uraian Jabatan

1. Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana bertugas memimpin seluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana, menetapkan kebijakan operasional, melakukan koordinasi lintas sektor, serta bertanggung jawab kepada Wali Kota Padang.

2. Sekretariat

Sekretariat bertugas memberikan pelayanan administrasi, keuangan, perencanaan program, kepegawaian, perlengkapan, dan ketatausahaan.

3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang ini melaksanakan identifikasi risiko bencana, mitigasi, sosialisasi, pembentukan Kelompok Siaga Bencana, pendidikan kebencanaan, simulasi evakuasi, dan penyusunan rencana kontinjensi.

4. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang ini bertanggung jawab melaksanakan kaji cepat, operasi tanggap darurat, evakuasi korban, distribusi logistik, pengelolaan posko darurat, serta koordinasi Tim Reaksi Cepat (TRC).

5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang ini bertugas melakukan pendataan kerusakan, pemulihan sarana prasarana, rehabilitasi sosial dan ekonomi masyarakat, serta rekonstruksi pascabencana.

- Program Penanggulangan Bencana BPBD Kota Padang

UIN IMAM BONJOL PADANG

Dalam rangka mewujudkan Kota Padang yang tangguh terhadap bencana, BPBD Kota Padang melaksanakan berbagai program pengurangan risiko bencana, antara lain:

1. Program Padang Kota Tangguh Bencana

   Program ini merupakan program unggulan BPBD Kota Padang yang bertujuan membangun ketangguhan seluruh unsur masyarakat terhadap ancaman bencana melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga. Program tersebut meliputi:

   1) Keluarga Tangguh Bencana
   2) Sekolah Tangguh Bencana
   3) Tempat Les Tangguh Bencana

4) Pasar Tangguh Bencana
5) Kelurahan Tangguh Bencana
6) Hotel Tangguh Bencana
7) Rumah Sakit TangguhBencana
8) Masjid Tangguh Bencana
9) Mall Tangguh Bencana
10) Kampus Tangguh Bencana
11) BUMN Tangguh Bencana
12) dan OPD Tangguh Bencana.

Melalui program tersebut, BPBD berupaya membangun budaya sadar bencana sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk mengenali risiko, melakukan evakuasi secara mandiri, dan berpartisipasi aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana.

2. Kajian Risiko Bencana (KRB)

   BPBD secara berkala menyusun Kajian Risiko Bencana sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

3. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)

   Dokumen ini menjadi pedoman seluruh perangkat daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

4. Pembentukan Kelompok Siaga Bencana (KSB)

   Kelompok ini dibentuk pada tingkat kelurahan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.

5. Tim Reaksi Cepat (TRC)

   TRC bertugas melakukan penanganan awal ketika terjadi bencana melalui kaji cepat, evakuasi, penyelamatan korban, dan koordinasi lapangan.

6. Pendidikan dan Simulasi Kebencanaan

UIN IMAM BONJOL PADANG

Program ini dilakukan secara berkala di sekolah, kampus, kantor pemerintahan, rumah sakit, tempat ibadah, dan lingkungan masyarakat.

7. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Program ini meliputi perbaikan rumah masyarakat, infrastruktur umum, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, serta pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat.

- Persiapan Menghadapi Bencana Banjir

Dalam menghadapi potensi bencana banjir, Pemerintah Kota Padang melalui BPBD telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi, edukasi kebencanaan, serta penyampaian informasi mengenai kondisi cuaca dan potensi bencana kepada masyarakat. Informasi tersebut salah satunya bersumber dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memberikan informasi mengenai potensi hujan lebat dan kondisi cuaca yang dapat meningkatkan risiko terjadinya banjir. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Robert Eka Putra selaku Sekretaris BPBD Kota Padang. informan menjelaskan:

UIN IMAM BONJOL PADANG

> “Kita berangkat dari cerita adanya press release dari BMKG tanggal 21 November yang mengatakan bahwasanya akan ada puncak siklon tanggal 27 malam jam 10.00 sampai jam 11.00 atau jam 22 sampai jam 23 dengan debit air hujan yang cukup tinggi dan naiknya air pasang di laut secara bersamaan(Robert, 2026)

Informasi dari BMKG kemudian menjadi salah satu bahan bagi BPBD dalam memberikan peringatan dan mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan.Upaya sosialisasi kepada masyarakat telah dilakukan sebelum terjadinya bencana banjir tahun 2025. Beliau menjelaskan bahwa pada tahun 2023 BPBD Kota Padang bekerja sama

dengan mahasiswa Universitas Andalas dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai potensi bencana banjir. Informan menjelaskan:

> "Tahun 2023 kita sudah melakukan sosialisasi bersama BPBD dengan mahasiswa UNAND. Masyarakat diajak untuk lebih memahami potensi banjir dan bagaimana menghadapi bencana, sehingga masyarakat lebih waspada kalau sewaktu-waktu terjadi musibah banjir (Robert, 2026)

Sosialisasi tersebut menunjukkan bahwa persiapan Pemerintah Kota Padang tidak hanya dilakukan setelah bencana terjadi, tetapi juga melalui upaya mitigasi dan kesiapsiagaan sebelum bencana. Masyarakat diberikan pengetahuan mengenai potensi bahaya di wilayah tempat tinggalnya sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat ketika terjadi peningkatan risiko banjir. Upaya ini menjadi bagian dari kebijakan pengurangan risiko bencana yang bertujuan mengurangi dampak terhadap keselamatan masyarakat dan kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Padang, termasuk dalam penanganan bencana banjir di Kelurahan Lubuk Minturun Sungai Lareh dan kawasan Batu Busuk. BPBD berperan dalam melakukan koordinasi, pelaksanaan, serta pengendalian kegiatan penanggulangan bencana bersama perangkat daerah dan berbagai pihak terkait. Peran tersebut mencakup setiap tahapan penanggulangan bencana, mulai dari mitigasi dan kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Dalam penelitian ini, BPBD Kota Padang menjadi salah satu sumber utama dalam memperoleh data dan informasi mengenai kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam menangani bencana banjir di kedua wilayah penelitian. Informasi yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan dokumen resmi BPBD digunakan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana. Selanjutnya, data tersebut dianalisis menggunakan perspektif *Siyāsah Syar'iyyah*, khususnya berkaitan

UIN IMAM BONJOL PADANG

dengan penerapan prinsip kemaslahatan, keadilan, amanah, dan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak bencana.

UIN IMAM BONJOL
PADANG